



Kolaborasi Manifestasi Komunikasi “Kiai Kampoeng”: Komunikasi Politik Kiai NU Masa Pendudukan Jepang

Kholid Mawardi^{)}*

^{*)} Penulis adalah Magister Humaniora (M.Hum.), dosen tetap Jurusan Pendidikan (Tarbiyah) STAIN Purwokerto.

Abstract: Emotional, cultural, and ideological vicinity between kiai kampoeng and NU's grassroots community has made kiai kampoeng have good sensitivity to them. At Japan occupation era, when NU's grassroots community in village area experience extreme suffering, kiai kampoeng share that experience. Therefore, collaboration with Japan military government is the best way chosen by kiai kampoeng to perform their religious tradition and saving NU's grassroots community from suffering. **Keywords:** kiai kampoeng, Japan occupation, and political communication.

PENDAHULUAN

Terma kiai kampung belakangan ini menjadi ramai dibicarakan setelah K.H. Abdurrahman Wahid membuat dan melaksanakan gagasan pertemuan dengan kiai-kiai kampung dengan tajuk “Ngaji Bersama Gus Dur”, pertemuan ini disebut dengan Majelis Silaturahmi Ulama Rakyat (Masura). Secara politis hal ini dilakukan oleh Gus Dur akibat banyaknya elite kiai yang telah menarik dukungan atasnya dalam menjalankan roda partai sehingga Gus Dur harus mencari legitimasi baru dalam menjalankan partai, maka Gus Dur memunculkan mitos baru, yaitu “kiai kampung” sebagai imbalan dari yang dulu juga dia ciptakan seperti *kiai langitan* atau *kiai sepuh*.

Secara tegas Gus Dur mengatakan bahwa elite kiai atau banyak kiai besar atau yang dibesarkan oleh media masa saat ini sulit berkomunikasi dengan rakyat karena lebih dekat dengan kekuasaan dan elit politik, yang berimbas kepada kekurangpekaan terhadap persoalan rakyat. Kiai kampung merupakan mata rantai yang strategis antara elite dengan rakyat, meskipun secara geografis kiai kampung kurang berpengaruh terhadap kekuatan supra desa, namun dalam konteks lokal kiai kampung sangat eksistensial dalam penyadaran dan pemberdayaan rakyat.

Yang dimaksudkan dengan kiai kampung adalah para ulama yang hidup di pedesaan yang *mangku* mushola atau *langgar*. Kenapa harus kiai kampung? Dari segi komunikasi politik, kiai kampung lebih mengerti bahasa rakyat, proses dialektika antara kiai kampung dengan rakyat tidak ada kendala sekat-sekat geografis, fisik, atau bahasa. Secara sosiologis kiai kampung memiliki kedekatan dengan rakyat karena dalam praksis sosial rakyat dapat membandingkan atau menilai apakah dalam kesehariannya kiai sesuai dengan ajaran yang disampaikan kepada rakyat. Dengan demikian, kepatuhan rakyat terhadap kiai kampung adalah kepatuhan yang sebenarnya yang didasarkan kepada empirisme sosial, rasionalitas, dan kepercayaan.

Fenomena saat ini yang terjadi adalah kepercayaan dan kedekatan rakyat dengan ulama besar mulai tergerus karena inkonsistensi mereka terhadap ajaran yang mereka sampaikan dengan praksis sosial yang mereka lakukan, ulama-ulama besar atau yang dibesarkan media menjadi tidak mengakar dalam komunitas rakyat. Dalam kondisi seperti ini, rakyat kemudian akan mencari panutan baru, yang secara moral dapat dipercaya oleh rakyat menjadi guru spiritual. Dalam konteks seperti inilah elite-elite politik mulai melirik keberadaan kiai kampung sebagai agen yang mampu melakukan komunikasi politik dengan rakyat, termasuk di dalamnya adalah Gus Dur yang kemudian menggagas pertemuan dengan kiai-kiai kampung.



Tulisan ini bermaksud untuk merunut kembali ke belakang ke masa pendudukan Jepang, apakah kiai kampung memegang peran penting dalam komunikasi politik antara pemerintah pendudukan Jepang dengan rakyat. Namun, dalam tulisan ini definisi kiai kampung tidak terbatas pengertiannya hanya kiai yang *mangku* mushola atau *langgar*, tetapi termasuk elite-elite kiai Islam tradisional yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama karena secara historis pada masa penjajahan Belanda kiai-kiai Islam tradisional disebut dengan *Oelama-oelama kampoeng*.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 1920, Jepang melakukan kajian-kajian mendalam mengenai Islam, dan sejak tahun 1930 Jepang melakukan agitasi terhadap dunia Islam bahwa Jepang adalah pelindung Islam. Tahun 1935 dan 1938 di Jepang didirikan dan diresmikan tempat ibadah yang megah dengan mengundang tokoh-tokoh muslim dunia, termasuk Pangeran Husain dari Yaman.¹ Dalam konteks Indonesia pada bulan November 1939 Perserikatan Islam Jepang (*Dai Nippon Kaikyo Kyokai*) mengundang tokoh-tokoh Islam luar negeri untuk menghadiri pameran Islam di Tokyo, delegasi umat Islam Indonesia diwakili oleh MIAI yang salah satunya adalah K.H. Machfudz Siddiq dari Nahdlatul Ulama.² Agitasi-agitasi Jepang terhadap dunia Islam ini sangat berpengaruh terhadap dunia muslim terutama di wilayah Asia Timur, termasuk di dalamnya Indonesia, suatu hal yang juga menyebabkan cepatnya penguasaan Jepang terhadap daerah Asia Tenggara yang kebanyakan adalah komunitas muslim.³

Dengan kampanye bahwa Jepang datang ke Jawa untuk menyelamatkan umat Islam dan Islam dari penjajahan Barat, maka Jepang datang ke Jawa dengan melenggang karena diterima dengan terbuka oleh komunitas muslim. Namun, dalam periode berikutnya karena arogansi dan kebutuhan logistik yang sangat banyak untuk memenangkan perang Asia Timur Raya, pemerintah pendudukan Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang kontra produktif terhadap janji-janjinya terhadap umat Islam, seperti pemaksaan budaya Jepang terhadap rakyat Indonesia dan penarikan hasil bumi besar-besaran secara paksa dari rakyat. Kebijakan tersebut membuat rakyat mengalami penderitaan yang sangat hebat. Semua segi kehidupan rakyat menjadi hancur termasuk di dalamnya kehidupan beragama.

Dalam kesengsaraan yang menyedihkan, agama menjadi satu-satunya pengharapan, namun sejauh mana agama mampu memberikan pelipur lara terhadap kondisi yang dihadapi tergantung kepada ketahanan hati komunitas muslim yang ada dan pemuka-pemuka agama dalam menyelamatkan umat dari kerusakan keberagamaan. Kondisi terparah dialami oleh komunitas muslim pedesaan karena mereka adalah masyarakat agraris yang menjadi sasaran kebijakan keras Jepang dalam penyediaan logistik perang.⁴ Dalam konteks inilah tulisan ini akan berpijak, bagaimanakah pemuka-pemuka muslim pedesaan (kiai-kiai kampung) mengambil peran dalam menyelamatkan umat dari kesengsaraan dan kerusakan keberagamaan pada masa pendudukan Jepang?

PERSEPSI MASYARAKAT NU TERHADAP JEPANG SEBELUM PENDUDUKAN

Agitasi yang dilakukan oleh Jepang terhadap dunia Islam betul-betul memesonakan umat Islam Indonesia, terutama masyarakat NU dalam tahun 1930-an, setelah K.H. Machfudz Siddiq pulang dari Jepang dengan membawa pengalaman yang luar biasa mengenai perkembangan industri Jepang terutama industri militer, maka masyarakat NU semakin meyakini bahwa hanya kekuatan Jepang-lah yang mampu membebaskan umat Islam Indonesia dari penjajahan Belanda.

Keyakinan ini semakin tebal karena secara historis pada tahun 1905 Jepang mampu mengalahkan Rusia. Bagi warga NU, Rusia adalah penjajah dan penindas umat Islam. Rusia menguasai negeri yang melahirkan ulama-ulama yang sangat dihormati oleh masyarakat NU, seperti Imam Bukhori yang karyanya menjadi literatur pokok di pesantren. Walaupun Jepang bukan penganut Islam, namun Jepang mempunyai kemampuan untuk membebaskan umat Islam dari penjajahan.⁵ Kondisi demikian betul-betul membuat masyarakat NU menjadi pro-Jepang sebelum kedatangannya ke Jawa.

Kekaguman masyarakat dan kiai-kiai NU terhadap Jepang sudah muncul sejak tahun 1936, Jepang disanjung-sanjung sebagai bangsa yang mempunyai jiwa kuat dan bersifat gagah berani sehingga mampu dengan mudah menguasai Tiongkok.⁶

Dalam bulan Januari 1937 dimuat dalam BNO artikel tentang kehebatan marinir Jepang dengan judul "*Theoriz jg. Menarik hati dari Ishimaru bila terbit perang antara Japan dan England*". Artikel itu berisi ulasan tentang teori-teori yang dikemukakan oleh Komander Tota Ishimaru yang berkenaan dengan dua hal, yaitu tentang konsep marinir Jepang dan dunia



diplomasi Jepang apabila terjadi peperangan dengan Inggris. Teori ini juga menyebutkan tentang kemungkinan Jepang akan diterima dengan baik di Indonesia karena rakyat Indonesia telah lama ditindas dan dibiarkan bodoh oleh Belanda, maka Jepang akan membantu bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya.⁷

Dalam bulan November 1937, K.H. Machfud Siddiq kembali menulis artikel di BNO dengan judul “*Adhimatun al-Japan*”, tulisan dalam artikel ini mengenai segala hal yang terkait dengan pemerintah Dai Nippon, seperti jumlah penduduk, penghasilan rakyat, aparat birokrasi, industri militer, dan surat kabar. Jepang dipuji dalam akhir tulisannya sebagai berikut.

Menilik djoemlah auto's jg. sedemikian sedikitnja bila ditimbang dengan kebesaran maoepoen kekajaan Dai Nippon (Japan) mengartilah kita kesederhanaan bangsa Japan. Sebaliknya, pabila kita tilik djoemlah kapal apinja, fabrieknja, kongsi peroesahaan dan persarekatannja, tahoealah kita betapa giatnja itoe bangsa di dalam menjoesoen masjarakatnja, kemoedian kita tilik djoemlah murid2 sekolah rendah dan tingginja (studenten) tahoealah sebab2 jg. mendjadikan Dai-Nippon senantiaso memboeboeng kapoentjak kemadjoean donijawji dan bolehlah Poetra Dai-Nippon menepok dadanja seraja mengoetjapkan: “Inilah..... Tamadoen ! Zonder drom-droman, zonder atoe letaknja petji dan potongan masjem2, zonder tjoel-tjoelan openjaar antara sang awewe...toch kita...disoengkani poetra barat, gentar dan soengkan !”

Dalam tahun-tahun terakhir pemerintah kolonial Belanda, masyarakat NU benar-benar merasa pro-Jepang, kampanye anti Barat telah begitu menarik simpati komunitas NU. Hal ini dinyatakan oleh K.H. Wahid Hasyim bahwa masyarakat NU membantu Jepang dalam rangka melepaskan belenggu penjajahan Belanda karena menghalang-halangi Jepang dan membantu Belanda sangat tidak mungkin bagi NU.⁹

REALITAS SOSIAL UMAT ISLAM INDONESIA AWAL PENDUDUKAN

Pada 1 Maret 1942 tentara Dai Nippon melakukan pendaratan di kota-kota Jawa, antara lain Banten, Indramayu, dan Rembang. Dalam waktu tiga hari Batavia dan Surabaya sudah dapat diduduki, dan pada 7 Maret 1942 tentara Dai Nippon mendirikan pemerintahan militer di Jawa.¹⁰

Sejak awal kedatangannya di Jawa pada bulan Maret 1942, pemerintah militer Jepang berulang-ulang menyampaikan tujuan mereka, yaitu menghargai dan menghormati Islam. Seminggu setelah Batavia diduduki, umat Islam ibu kota dikejutkan dengan adanya tentara-tentara Jepang yang melakukan ibadah shalat di beberapa masjid di Jakarta. Beberapa hari kemudian seorang kolonel yang bernama Kolonel Horie muncul di masjid Kwitang bersama seorang muslim Jepang bernama Muhammad Abdul Muniam Inada dan memberikan pidato dalam bahasa Jepang.¹¹

Akan tetapi, kekaguman dan harapan masyarakat muslim Indonesia berubah menjadi kebencian yang mendalam ketika pemerintah Jepang melakukan kebijakan Japanisasi, sebuah kebijakan yang memaksakan tradisi Jepang untuk diberlakukan kepada masyarakat Indonesia. Masalah krusial yang menjadi penyebab adalah mengenai kedewaan Kaisar Jepang dan penghormatannya yang sangat bertentangan dengan Islam. Kebijakan *saikerei*, membungkukkan badan ke istana kaisar serupa dengan ruku' dalam shalat. Pemaksaan seremoni penghormatan ini telah memunculkan keresahan dan resistensi masyarakat muslim Indonesia.¹²

Saikerei menyebabkan komunitas NU merapatkan barisan, kiai-kiai NU dan pengasuh pesantren menyatakan penolakan secara tegas mengenai hal itu, kemudian disampaikan kepada *Saikoo Sikikan*, panglima tentara Jepang di Jakarta, namun keharusan untuk melakukan *saikerei* tetap diberlakukan.¹³

Protes terhadap kewajiban *saikerei* banyak disuarakan oleh kiai-kiai NU, K.H. Hasyim Asy'arie mengeluarkan fatwa haram, yaitu melarang umat Islam khususnya warga NU untuk melakukan *saikerei*¹⁴, fatwa haram terhadap *saikerei* ini cepat menyebar ke seluruh pesantren di Jawa dan menjadi pegangan bagi kiai pengasuh pesantren untuk menolak kewajiban *saikerei*. Fatwa haram ini dipahami sebagai keputusan resmi NU karena dikeluarkan oleh Rais Akbar NU.¹⁵

Fatwa tersebut dianggap sebagai penghasutan dan penentangan secara terbuka terhadap Jepang, maka K.H. Hasyim Asy'arie ditangkap dan dipenjarakan,¹⁶ menyusul kemudian K.H. Machfudz Siddiq ketua HBNO ditangkap dan juga dipenjarakan.¹⁷ Peristiwa ini membuat gempar komunitas NU dan pesantren, secara kelembagaan NU merespon hal ini pada 1 Agustus 1942 dengan mengadakan pertemuan konsul NU seluruh Indonesia di Jakarta dengan agenda pembebasan K.H. Hasyim Asy'arie dan K.H. Machfudz Siddiq melalui jalur diplomasi.¹⁸



Keperihatinan warga NU dan pesantren atas peristiwa ini diwujudkan dalam seruan untuk melakukan gerakan *mabadi nasrillah* yang terdiri dari tiga hal pokok, yaitu *tawazuru ba'dhuhum ba'dha* (saling mengunjungi dan mempererat persatuan), *tawashaw bi al-haqiqi wa tawashaw bi as-shabri* (memberi nasihat kebenaran dan ketabahan berjuang), dan *riyadhah ruhaniyah* atau mendekatkan diri kepada Allah untuk memohon pertolongan Nya dengan memperbanyak *wirid*, *hizb*, dan *doa*.¹⁹

Perlawanan secara fisik terhadap keharusan *saikerei* dilakukan oleh K.H. Zainal Mustofa wakil syuriah NU dan pengasuh Pesantren Sukamanah Singaparna beserta pengikutnya. Pada 25 Februari 1944 sehabis shalat Jum'at terjadi perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh K.H. Zainal Mustofa dan pengikutnya terhadap tentara Jepang. Segera setelah itu diadakan penumpasan secara brutal oleh pemerintah militer Jepang, kemudian dilanjutkan penangkapan-penangkapan tokoh-tokoh perlawanan di antaranya K.H. Zainal Mustofa dan beberapa kiai NU yang lain.²⁰

Di sisi lain, karena kebutuhan logistik yang besar untuk memenangkan perang Asia Timur Raya, maka pemerintah pendudukan membuat kebijakan yang sangat memberatkan rakyat Indonesia terutama petani. Pada masa awal pendudukan, pemerintah militer Jepang membentuk bagian khusus perekonomian (*keizaibu*) yang mempunyai tugas merancang aturan-aturan untuk memperkuat keadaan ekonomi di daerah. Pada tahap awal aturan yang dikeluarkan oleh *Keizaibu* hanyalah anjuran-anjuran, namun kemudian menjadi aturan-aturan yang memaksa, seperti penanaman bahan makanan di pekarangan-pekarangan, tumbuhan-tumbuhan berserat untuk bahan pakaian, dan pendaftaran berbagai harta masyarakat seperti, pohon dan hewan ternak yang kemudian dibeli pemerintah dengan harga yang telah ditentukan secara sepihak oleh pemerintah.²¹ Yang memberatkan adalah harga yang dipatok pemerintah sangat rendah di bawah harga pasar, dengan banyaknya barang yang dibeli pemerintah, maka barang di pasaran sangat langka, walaupun ada harganya sangat tinggi.²²

Tekanan berat terhadap petani adalah dengan adanya kewajiban penyeteroran padi hasil panen kepada pemerintah dengan ketentuan 40% menjadi milik petani, 30% disetor kepada pemerintah melalui *Beikoku Seimeigyō* (komisi penggilingan padi) yang dibeli dengan harga pemerintah, dan 30% disediakan untuk bibit yang harus disetor ke lumbung desa.²³

Penyeteroran padi ini merupakan tekanan yang berat bagi petani, persediaan padi untuk cadangan bahan makanan cenderung kurang bahkan untuk benih juga mengalami kekurangan. Persoalan ini menyebabkan munculnya kelaparan di pedesaan.²⁴ Meskipun demikian, di daerah Paliyan Gunung Kidul masyarakat menyerahkan dengan sukarela padi mereka kepada pemerintah tanpa meminta ganti pembayaran,²⁵ suatu hal yang mungkin dirasa sangat aneh pada masa itu.

Pendukung utama NU yang mayoritas petani pedesaan yang secara ekonomi tergolong lemah merupakan salah satu komunitas yang paling merasakan kesengsaraan akibat berbagai kebijakan ekonomi dan pertanian Jepang. Kesengsaraan yang mereka alami berakibat pada merosotnya ketaatan beribadah dalam komunitas akar rumput NU ini.

Banyak digambarkan bahwa pada masa-masa itu, rakyat sangat sulit untuk mendapatkan bahan pakaian dan makanan, dalam kesengsaraan yang sangat seperti ini menyebabkan banyak masyarakat muslim meninggalkan ibadah kepada Allah. Kebanyakan perempuan dari masyarakat bawah NU meninggalkan shalat karena tiadanya *rukūh* atau pakaian shalat untuk perempuan.²⁶ Kondisi sengsara semacam ini juga banyak dialami oleh kiai-kiai NU terutama di daerah Jawa Tengah yang kebanyakan merupakan petani kecil yang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya lebih banyak disokong oleh pengikut setianya. Pada masa pendudukan Jepang banyak kiai yang miskin.²⁷

Begitu juga pesantren, pada masa pendudukan Jepang termasuk terkena dampak buruk yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah, dampak yang paling nyata adalah menurunnya jumlah santri. Banyak pesantren yang jumlah santrinya tinggal separuh, bahkan tidak jarang pula pesantren yang ditinggalkan oleh seluruh santri mukim yang ada tinggal santri kalong. Hal ini disebabkan kemiskinan yang dialami wali santri dan tidak sanggup lagi mengirimkan bekal bagi anaknya di pesantren sehingga kebanyakan santri harus pulang ke daerah asal.²⁸ Akan tetapi, ada beberapa pesantren yang mendapat bantuan logistik dari pemerintah pendudukan Jepang.²⁹

Banyaknya masyarakat akar rumput NU yang meninggalkan ibadah, meskipun dalam kondisi terpaksa telah memunculkan keprihatinan dan perhatian yang serius dari kiai-kiai dan pengurus besar NU (HBNO). Di bawah Rais Syuriah



K.H. Wahab Chasbullah, poin penting perjuangan NU pada masa pendudukan Jepang adalah memperbaiki keadaan keagamaan masyarakat akar rumput NU dan mengganggu kemiskinan yang mereka alami.³⁰

RESISTENSI TERHADAP *SAIKEIREI* SEBAGAI CARA MENINGKATKAN DAYA TAWAR TERHADAP PEMERINTAH MILITER JEPANG

HBNO di bawah kepemimpinan K.H. Wahab Chasbullah telah menetapkan strategi perjuangan menghadapi pemerintah pendudukan Jepang melalui jalur politik diplomasi. Dalam rangka membebaskan kiai-kiai NU dari penjara Jepang dan menyelamatkan masyarakat akar rumput NU dari kemiskinan serta kerusakan beragama maka pengurus HBNO yang diwakili oleh K.H. Wahab Chasbullah dan K.H. Wahid Hasyim melakukan pendekatan terhadap Jepang.

Para diplomat NU ini berusaha meyakinkan *Saikoo Sikikan* (panglima perang tentara Jepang di Jawa) di Jakarta bahwa kiai-kiai senior NU yang mereka tangkap dan penjarakan adalah elite-elite yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat akar rumput (petani),³¹ mereka adalah aset yang berharga untuk Jepang sebagai mesin propaganda yang efektif agar Jepang mendapat dukungan masyarakat akar rumput sebagai penyedia logistik dan tentara cadangan dalam rangka memenangkan perang Asia Timur Raya.

Mereka meminta pemerintah pendudukan Jepang untuk melihat realitas yang ada bahwa fatwa haram (seruan untuk menolak) *saikeirei* oleh salah seorang kiai senior NU begitu ditaati oleh masyarakat muslim akar rumput sehingga mereka banyak melakukan pembangkangan terhadap tradisi *saikeirei*. Pada saat pemerintah pendudukan Jepang menetapkan K.H. Hasyim Asy'arie sebagai aktor intelektual dalam pembangkangan secara terbuka terhadap kewajiban *saikeirei* yang kemudian ditangkap dan dipenjarakan telah memunculkan solidaritas yang luar biasa dari masyarakat muslim akar rumput dengan meminta kepada pemerintah militer Jepang untuk dipenjarakan bersama panutan mereka,³² perilaku ini sangat merepotkan tentara Jepang.

Gerakan diplomasi ini semakin diintensifkan oleh kalangan muda NU yang meyakini bahwa Jepang memerlukan kebutuhan logistik perang dan kebutuhan dukungan rakyat untuk kemenangan perang. Jepang memerlukan kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat akar rumput, untuk menjadi propagandais dalam rangka memobilisasi rakyat untuk kepentingan perang. Mereka yakin bahwa pada nantinya Jepang akan lebih memilih kiai dan ulama kampung untuk didekati karena mempunyai pengaruh yang kuat terhadap rakyat.³³ Kondisi ini secara sadar dipergunakan oleh elite-elite muda NU untuk memperkuat posisi dalam rangka memperjuangkan masyarakat akar rumput NU.³⁴

Dalam masa-masa ini, pemerintah militer Jepang mulai kehilangan kepercayaan terhadap perkumpulan Islam Indonesia yang mereka bentuk, MIAI adalah organisasi Islam bentukan Jepang yang pada awalnya dimaksudkan sebagai pusat propaganda pro-Jepang terhadap muslim Indonesia, namun karena MIAI diisi oleh banyak intelektual muslim perkotaan yang tidak mengakar bahkan tidak dikenal oleh masyarakat muslim akar rumput, maka organisasi ini mandul tidak dapat berbuat banyak, maka pemerintah militer Jepang mulai mencari alternatif untuk mesin propaganda mereka.³⁵

Sepertinya usaha diplomasi tokoh-tokoh NU mulai menunjukkan hasilnya, pemerintah militer Jepang mulai mengalihkan kepercayaan dari pengurus MIAI yang merupakan elite Islam perkotaan kepada kiai, ulama-ulama dan guru-guru ngaji pedesaan, dilanjutkan dengan pembebasan K.H. Hasyim Asy'arie dan K.H. Machfoedz Siddiq pada bulan Agustus 1942.³⁶ Arah baru kebijakan Jepang diakhir tahun 1942 ini dilanjutkan dengan kampanye-kampanye pembesar Jepang yang secara terang-terangan memuji dan menempatkan kiai, ulama, guru-guru ngaji pedesaan dalam posisi terhormat dan penghargaan yang tinggi terhadap agama Islam.³⁷

RURALISASI, ARAH BARU KEBIJAKAN POLITIK JEPANG

Pada 7 Desember 1942 dalam sebuah resepsi yang sangat megah 32 ulama dari seluruh Jawa diberi penghormatan yang tinggi oleh panglima tertinggi militer, di antaranya yang diundang adalah tokoh-tokoh NU, K.H. Hasyim Asy'ari, K.H.



Machfoed Siddiq, dan K.H. Wahid Hasyim.³⁸ Dalam kesempatan tersebut Gunseikan Mayor Jendral Okazaki menyatakan bahwa ulama adalah pemimpin Islam, dengan mengesampingkan pengurus-pengurus MIAI, dia menyebutkan bahwa para ulama adalah pemimpin-pemimpin agama yang dihormati rakyat.³⁹

Umat Islam Indonesia semakin bersimpati kepada pemerintah militer Jepang setelah adanya pengakuan kesalahan dari pemuka-pemuka Jepang dalam kebijakan mereka yang keliru terhadap Islam. Permintaan maaf yang dilakukan secara terbuka disampaikan oleh Gunseikan terhadap kesalahan-kesalahan yang diperbuat tentara Jepang terutama yang bersangkutan dengan masalah-masalah Islam. Dalam kesempatan yang berbeda Gunseikan menyatakan hal yang sama bahwa pemerintahan militer bertujuan untuk melindungi dan menghormati Islam. Persoalan yang muncul lebih dikarenakan adanya kesalahpahaman antara umat Islam dan pemerintah. Umat Islam mengetahui sedikit adat istiadat Dai Nippon, dan Nippon belum mempunyai informasi yang cukup tentang agama Islam dan cara hidup Islam. Pemerintah akan segera mengadakan kajian menyeluruh terhadap agama Islam untuk terjadinya hubungan yang lebih baik dengan umat Islam.⁴⁰

Seorang muslim Jepang wakil pemerintah militer, Abdul Muniam Inada dalam sambutan perayaan Maulid Nabi di Masjid Kwitang, menyatakan bahwa sikap dan pendirian pemerintah Balatentara Dai Nippon terhadap agama Islam telah terang dan nyata. Pemerintah menghormati dan menjunjung tinggi agama Islam. Walaupun banyak terjadi hal-hal yang mengecewakan terhadap agama Islam, tetapi sama sekali pemerintah tidak bermaksud melakukan penghinaan. Semuanya terjadi karena bangsa Nippon belum memahami Islam dan bangsa Indonesia belum mengerti adat Nippon.⁴¹

Banyaknya kiai NU yang dibebaskan dari tahanan,⁴² penghargaan terhadap kiai, ulama, dan guru-guru mengaji di pedesaan dan permohonan maaf secara terbuka akan kekeliruan mereka terhadap Islam dan umat Islam telah membuat sebagian kiai-kiai senior NU yang semula melakukan penentangan terhadap Jepang menjadi lebih akomodatif terhadap pemerintahan militer Jepang.⁴³

Kedekatan NU dengan pemerintah militer Jepang semakin membaik setelah pada 10 September 1943 pemerintah mengakui secara resmi organisasi NU dan Muhammadiyah yang telah dibekukan.⁴⁴ NU menjadi semakin dekat dengan pemerintah militer Jepang setelah diangkatnya K.H. Hasyim Asy'ari Rais Akbar NU pada 13 Oktober 1943 menjadi penasihat tentara PETA untuk mendorong semangat perang sabil.⁴⁵ Kedekatan ini berada pada posisi yang ideal pada saat K.H. Hasyim Asy'arie pada 14 Oktober 1943 diangkat menjadi ketua Masyumi dan menjadi kepala *Shumubu* menggantikan Prof. Hussein Djajadiningrat pada 13 Maret 1944.⁴⁶

Bulan-bulan berikutnya banyak kiai senior NU yang larut dalam arah baru kebijakan Jepang, yaitu ruraliasi politik, bahkan telah menjadi propagandais Jepang yang handal sebagaimana diakui oleh tokoh muda NU pada masa itu, K.H. Wahid Hasyim.⁴⁷

SIKAP MANIS MUKA UNTUK MENYELAMATKAN TRADISI DAN MASYARAKAT AKAR RUMPUT NU

Kekuatan militer Jepang telah diakui oleh banyak elite NU sejak awal, kedatangan Jepang ke Jawa hanya tinggal menunggu waktu sehingga masyarakat NU perlu untuk menetapkan strategi dalam bersikap baik dengan tentara Jepang atau pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak awal banyak elit NU sudah berniat untuk bekerjasama dengan Jepang terutama untuk membebaskan bangsa dan umat Islam Indonesia dari penjajahan Belanda.⁴⁸ Sikap terhadap Jepang ini dibahas dalam rapat pimpinan HBNO di Surabaya yang dipimpin oleh ketua HBNO K.H. Machfoed Siddiq.⁴⁹ Walaupun strategi pro Jepang ini merupakan keputusan NU, namun lebih merupakan keinginan elite-elite muda NU sehingga pada awala kedatangan Jepang terjadi perbedaan pendekatan antara *kiai sepuh* dengan kalangan muda NU terhadap Jepang, terutama terhadap kebijakan kontroversial *saikerei*.⁵⁰

Sikap pro Jepang yang menemui bentuk idealnya dalam kolaborasi dengan pemerintahan militer Jepang baru terjadi pada masa akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah pengakuan kesalahpahaman, permohonan maaf dan penghargaan yang tinggi terhadap ulama dan kiai-kiai kampung, maka HBNO memutuskan untuk bekerjasama dengan Jepang bahkan menjadi bagian dari pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia.



Langkah penting yang dilakukan adalah dengan memasukkan kiai-kiai NU dalam *Shumuka* (Kantor Urusan Agama Karesidenan) yang mensyaratkan untuk kepalanya (*Shumukacho*) adalah seorang ulama. Pegawai-pegawai *Shumuka* adalah orang-orang yang berpendidikan ulama atau bukan ulama, tetapi harus berjiwa Islam dan mempunyai cita-cita perjuangan Islam.⁵¹ Persyaratan ini sangat menguntungkan masyarakat akar rumput NU yang kebanyakan berpendidikan ulama di pesantren. Pembaharuan madrasah yang dilakukan oleh NU Bagian Pengajaran dengan memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulum madrasah NU, semakin memantapkan peluang warga NU untuk masuk dalam struktur pemerintahan Jepang.⁵²

Sikap kolaborasi dengan Jepang ini dibangun dari sebuah kesadaran bahwa akan lebih baik apabila memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Jepang untuk memperkuat posisi NU dan menyelematkan warga akar rumput NU.⁵³ Kolaborasi dalam bentuk kerjasama itu kemudian memunculkan sikap manis muka, kemahiran bersandiwara politik umat Islam sangat baik, di saat pemerintah militer membutuhkan dukungan rakyat maka setiap kegiatan yang dilakukan untuk menyelamatkan keberagaman umat Islam dan kehancuran kehidupan rakyat dikatakan sebagai usaha dalam rangka menuju kemenangan Asia Timur Raya.⁵⁴

Elite-elite NU banyak yang menggunakan kesempatan sebagai propagandais Jepang, untuk melakukan penyadaran terhadap rakyat tentang kondisi bangsa yang terjajah. Upaya ini banyak terlihat dalam berbagai tulisan elit-elit NU baik dalam majalah *Soeara Moeslimin Indonesia*, *As-Sulah* dan dalam berbagai pertemuan Ulama. Propaganda yang dilakukan oleh elit-elit NU mengangkat tiga isu penting, yaitu memperkokoh persatuan untuk membantu perang Asia Timur Raya, semangat jihad mengusir penjajah Belanda, dan bersama Dai Nippon menuju kemerdekaan Indonesia serta kemerdekaan beragama.⁵⁵

Selama awal tahun 1943 *Shumubu* banyak menghabiskan waktu untuk melakukan pendekatan kepada kiai-kiai dan ulama pedesaan untuk dijadikan propagandais Jepang. Usaha ini secara serius dilaksanakan setelah Gunseikan mengalihkan kebijakan dengan pengakuan pemerintah militer Jepang terhadap kiai-kiai dan ulama pedesaan sebagai faktor penting dalam masyarakat Indonesia.⁵⁶

Dalam bulan Mei sampai Agustus dilaksanakan pelatihan-pelatihan ulama, yang dilakukan untuk memberikan jaminan terbentuknya propagandais andal. Keadaan ini telah menempatkan posisi kiai-kiai dan ulama pedesaan jauh menjadi lebih baik dalam peta politik-administratif dibanding pada masa pemerintahan Belanda.⁵⁷

Pada akhir Januari 1944 Gunseikan memberikan edaran kepada para Residen (*Shukocan*) di semua propinsi Jawa yang berisi konsesi penting kepada kiai-kiai dan ulama pedesaan dalam kegiatan agama. Sejak saat itu sebagian besar pemimpin agama dibebaskan dari kontrol langsung para pejabat pemerintahan. Kiai dan ulama tidak perlu lagi meminta izin untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agama Islam atau pertemuan agama yang dipergunakan untuk sosialisasi kebijakan pemerintah. Pemerintah militer Jepang memerintahkan para pejabat priyayi untuk memberikan bantuan sedapat mungkin kepada para pemimpin Islam dalam usaha-usahnya untuk membantu upaya untuk meningkatkan produksi dan kerjasama dalam usaha-usaha perang.⁵⁸

Kebijakan pemerintah militer ini banyak menguntungkan umat Islam, terutama NU yang masyarakat pendukungnya kebanyakan secara geografis berada di pedesaan. Kehidupan agamis masyarakat NU pedesaan yang berlokasi di sekitar pesantren-pesantren dan kiai-kiai kampung (pemangku masjid dan langgar), secara tidak langsung terselamatkan oleh elit-elit mereka yang ditugaskan sebagai propagandais oleh pemerintah militer Jepang. Pengaruh dan kedekatan kiai-kiai NU dengan masyarakat pengikutnya di pedesaan, semakin memantapkan perlindungan para elit terhadap umatnya di pedesaan melalui pengajian-pengajian.⁵⁹

Kelonggaran yang diberikan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan keagamaan telah banyak mendorong kiai-kiai NU untuk semakin memantapkan tradisi keagamaan mereka yang telah lama berlangsung, pengajian, *haul*, *tahlilan* dan *khataman*. Pada 7 Februari 1944 diadakan *haul* Pangeran Diponegoro di Pesantren Jatisalam Bagelen Purworejo.⁶⁰ Januari 1944 dilangsungkan khataman di Pondok Pesantren al-Munawir Krapyak Yogyakarta yang dihadiri oleh pembesar-pembesar Dai-Nippon dan ulama-ulama terkemuka di Jawa.⁶¹ Juni 1944 K.H. Abdul Manaf Murtadlo bersama pembesar Dai-Nippon



melaksanakan shalat ghaib dan tahlilan bagi masyarakat dan tentara Dai-Nippon yang meninggal dalam serangan Sekutu di Surabaya.⁶²

Peran kiai-kiai NU pedesaan dan pesantren sebagai propagandais kebijakan pemerintah militer Jepang ternyata telah menghindarkan warga NU dan pesantren dari kewajiban *Romusha*,⁶³ namun tidak dapat menghindarkan mereka dari kebijakan-kebijakan yang tidak terlalu berbahaya, seperti pengumpulan padi warga NU, dimasukkannya pemuda-pemuda NU dan pesantren dalam *Kaiboodan* yang bertugas menjaga daerah-daerah pedesaan mereka dari serangan udara Sekutu.⁶⁴

Pemberian peran yang penting bagi elite-elite NU, baik yang ada di Masyumi, *Shumubu*, dan badan lain seperti seperti *Chuo Sangiin* (Dewan Penasihat Pusat) dan *Shu Sangi Kai* (Dewan Penasihat Daerah),⁶⁵ telah membuat posisi NU dan warganya aman dalam pemerintahan militer Jepang dan menempatkan elit-elit NU dalam posisi yang menentukan pada proses-proses politik setelah pendudukan Jepang.⁶⁶

KESIMPULAN

Kiai kampung pada masa pendudukan Jepang mempunyai peran sangat penting dalam fungsinya sebagai jembatan untuk melakukan komunikasi politik antara pemerintah pendudukan dengan rakyat. Dalam konteks pemerintah, kiai kampung diharapkan mampu menjadi propagandais dalam rangka untuk meningkatkan produksi dan kerjasama untuk kepentingan perang sedangkan bagi rakyat kiai kampung adalah panutan dan pelindung yang sangat diharapkan mampu menghindarkan mereka dari kebijakan keras Jepang.

Kedekatan secara kultural dan ideologis kiai kampung dengan umatnya menjadi pertimbangan utama kiai kampung dalam menjalankan peran sebagai jembatan komunikasi politik antara pemerintah pendudukan dengan rakyat. Propaganda pro-Jepang, bagi kiai kampung merupakan kamufase untuk menegakkan tradisi keagamaan dan menyelamatkan masyarakat akar rumput NU dari kesengsaraan.

ENDNOTE

¹ Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Edisi Terjemah (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hal. 134.

² Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: P.T. Al-Ma'arif, 1981), hal. 625.

³ Kholid Mawardi, *Madzhab Sosial Keagamaan NU* (Yogyakarta, Grafindo Litera Media, 2006), hal. 75.

⁴ *Ibid.*, hal. 84.

⁵ Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan*, hal. 603.

⁶ *Berita Nahdlatol 'Oelama*, No. 3, 1 Desember 1936, hal. 15-16.

⁷ Machfoedz Siddiq, "Theorie2 jg menarik hati dari Ishimaru, apabila terbit perang antara Japan dan England", dalam *Berita Nahdlatol 'Oelama*, No. 5, 1 Januari 1937, hal. 14-15.

⁸ Machfoedz Siddiq, "Adhimatun al-Japan", dalam *Berita Nahdlatol 'Oelama*, No. 1, 1 November 1937, Th. 7, hal. 9-10. Lihat juga Kholid Mawardi, *Madzhab Keagamaan NU.*, hal. 74.

⁹ Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-orang dari Pesantren* (Yogyakarta: LKIS, 2001), hal. 203.

¹⁰ Djawa Sjinboen Sja, *Almanak Asia Raya 2604 Tahoen ke II* (Jakarta:TP, 1944), hal. 50-51.

¹¹ Harry J. Benda, *Bulan Sabit*, hal. 142.

¹² Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta: LKIS, 2000), hal. 96.

¹³ Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan*, hal. 226.

¹⁴ Latiful Khuluq, *Fajar Kabangunan*, hal. 96.

¹⁵ Kholid Mawardi, *Madzhab Sosial.*, hal. 78.

¹⁶ Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan.*, hal. 226.

¹⁷ Maksoem Machfoedz, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama* (Surabaya: Yayasan Kesatuan Umat, 1982), hal. 62.

¹⁸ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Sala: Jatayu Sala, 1985), hal. 114.

¹⁹ Faifuddi Zuhri, *Sejarah Kebangkitan*, hal. 273.



²⁰ Ietje Marlina, "K.H.Z. Mustofa dalam Pertawanan Santri terhadap Jepang Tahun 1944, Studi di Pesantren Sukamanah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya", dalam dalam *Seminar Sejarah Nasional V Sub Tema Sejarah Perjuangan* (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Depdikbud, 1990), hal. 202. Lihat juga Harry J. Benda, *Bulan Sabit*, hal. 195.

²¹ Heru Soekadri K., *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jawa Timur* (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Depdikbud, 1991), hal. 22.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hal. 24.

²⁵ *As-Sulah*, No. 5, 10 Rajab 1363, Th. 1, hal. 11-12.

²⁶ Kholid Mawardi, *Madzhab Sosial*, hal. 85.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan*, hal. 261, lihat juga Kholid Mawardi, *Madzhab Keagamaan NU*, hal. 86.

²⁹ *As-Sulah*, No. 2, Jumadil Awal, Th. 1, hal. 9.

³⁰ Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan*, hal. 633.

³¹ *Ibid.*, hal. 228.

³² *Ibid.*, hal. 226.

³³ *Ibid.*, hal. 203.

³⁴ Kholid Mawardi, *Madzhab Sosial*, hal. 99.

³⁵ Harry J. Benda, *Bulan Sabit*, hal. 167.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Latiful Khuluq, *Sejarah Kebanguna*, hal. 98.

³⁸ *Pembangoen*, Senin, 4 Januari 2603.

³⁹ Harry J. Benda. *Bulan Sabit*, hal. 150.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 153.

⁴¹ *Pembangoen*, Sabtu, 3 April 2603.

⁴² Yang dibebaskan dari tahanan termasuk KH. Rukhiyat dan KH. Zainal Mustofa Singaparna, meskipun pada bulan Februari 1944 KH. Zainal Mustofa melakukan pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah militer Jepang.

⁴³ Kholid Mawardi, *Madzhab Sosial*, hal. 95.

⁴⁴ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), hal. 23.

⁴⁵ *Soeara Masjoemi*, 1 Desember 1943.

⁴⁶ Kholid Mawardi, *Madzhab Sosial*, hal. 97.

⁴⁷ Aboebakar, *Sedjarah Hidup K.H. A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar*, (Jakarta: Panitia Buku Peringatan, 1957), hal. 331.

⁴⁸ Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan*, hal. 203.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Kholid Mawardi, *Madzhab Sosial*, hal. 99.

⁵¹ Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan*, hal. 231.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, hal. 233.

⁵⁴ Aboebakar, *Sejarah Hidup*, hal. 336.

⁵⁵ Kholid Mawardi, *Madzhab Sosial*, hal. 101.

⁵⁶ Harry J. Benda, *Bulan Sabit*, hal. 166.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 169. Lihat juga *Soeara Moeslimin Indonesia*, No. 1, 1 Djanoeari 2604, Th. II, hal. 11.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 193.

⁵⁹ Kholid Mawardi, *Madzhab Sosial*, hal. 109.

⁶⁰ *As-Sulah*, No. 14, 25 Muharam 1364, Th. 1, hal. 12-13.

⁶¹ *As-Sulah*, No. 4, 25 Jumadil Akhir 1363, Th. 1, hal. 13.

⁶² *Ibid.*, hal. 8-10.

⁶³ Kholid Mawardi, *Madzhab Sosial*, hal. 111.

⁶⁴ Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan*, hal. 261, 267.



⁶⁵ Elite NU yang menjadi anggota Chuo Sangiin adalah K.H. Wahid Hasyim dan K.H. Soetisna Sanjaya sedangkan yang menjadi anggota Shu Sangi Kai adalah K.H. Abdul Wahab Chasbullah (Jombang), K.H. Fakhri Usman (Gresik), K.H.M. Masykur (Singosari Malang), KH. Moehammad Moenir (Bangkalan), Sjinboen Sja, *Op. Cit.*, hal. 99-101, lihat juga Benda, *Op. Cit.*, hal. 171.

⁶⁶ Kholid Mawardi, *Madzhab Sosial*, hal. 112.

DAFTAR PUSTAKA

- Aboebakar. 1957. *Sedjarah Hidup K.H. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*. Jakarta: Panitia Buku Peringatan.
As-Sulah, No. 5, 10 Rajab 1363, Th. 1.
As-Sulah, No. 2, Jumadil Awal, Th. 1.
As-Sulah, No. 14, 25 Muharam 1364, Th. 1.
As-Sulah, No. 4, 25 Jumadil Akhir 1363, Th. 1.
Berita Nahdlatol 'Oelama, No. 3, 1 Desember 1936.
Anam, Choirul. 1985. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Sala: Jatayu Sala.
Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Grafiti Pers.
Sja, Djawa Sjinboen. 1944. *Almanak Asia Raya 2604 Tahoen Ke-II*. Jakarta: TP.
Benda, Harry J. 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Edisi Terjemah. Jakarta: Pustaka Jaya.
Soekadri K., Heru. 1991. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jawa Timur*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Depdikbud.
Martina, Ietje. 1990. "K.H.Z. Mustofa dalam Perlawanan Santri terhadap Jepang Tahun 1944, Studi di Pesantren Sukamanah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya", dalam *Seminar Sejarah Nasional V Sub Tema Sejarah Perjuangan*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Depdikbud.
Mawardi, Kholid. 2006. *Mazhab Sosial Keagamaan NU*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
Khuluq, Lathiful. 2000. *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*. Yogyakarta: LKIS.
Siddiq, Machfoedz. 1937. "Theorie2 jg menarik hati dari Ishimaru, apabila terbit perang antara Japan dan England", dalam *Berita Nahdlatol 'Oelama*, No. 5, 1 Januari 1937.
. 1937. "Achimatun al-Japan", dalam *Berita Nahdlatol 'Oelama*, No. 1, 1 November 1937, Th. 7.
Machfoedz, Maksoem. 1982. *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*. Surabaya: Yayasan Kesatuan Umat.
Zuhri, Saifuddin. 1981. *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: P.T. Al-Ma'arif.
. 2001. *Guruku Orang-orang dari Pesantren*. Yogyakarta: LKIS.
Soeara Moeslimin Indonesia, No. 1, 1 Djanoeari 2604, Th. II.
Soeara Masjoemi, 1 Desember 1943.